

ANALISIS KEBERLANJUTAN USAHA TANI KELAPA SAWIT PADA BEBERAPA MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN JENIS LAHAN USAHA DI KAMPAR, RIAU

Mamat H.S.¹, Puspitasari², Deciyanto Soetopo³, dan Chalid Talib⁴

¹Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

³Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

⁴Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Email : mamath.suwanda@gmail.com

ABSTRACT

Sustainability Analysis of Oil Palm Farming Business in Several Management and Types of Business Land in Kampar, Riau. Oil palm is one of the mainstay of export commodities and farmers' income, including cultivated on peat land. The use of peat land for agriculture is feared to threaten the sustainability of farming, mainly due to a decrease in environmental quality. Sustainability analysis of oil palm had objectives to assess the sustainability index of oil palm farming system from some of the plasma management of oil palm farmers and to determine sensitive factors or leverage points as suggestions to improve the sustainability of oil palm farming system especially on peatlands. Through multidimensional scalling (MDS) analysis based on five dimensions such as economic, ecological, social, technological, and legal and institutional. MDS analysis was carried out on six management models of oil palm farming. The results of the analysis showed that the plasma management of oil palm farmers assisted by private companies (PT. Agro Lestari) on peatlands was the highest level of sustainability, which index sustainability was 60.2 or in a fairly sustainable category. Sensitive factors that can used as a determinant point of the sustainability of farming system, including market access, cultivated land area of farmers, and reasonable prices (economic dimension); maturity of peat land, and the existence of cover crops as ground cover plants (ecological dimension); negative oil palm issues, the role of farmer groups and availability of labor at the local level (social dimension); availability of road facilities (technology dimension); companion effectiveness, ease of licensing, and integration and contribution of existing institutions in the regions related to oil palm farming system (legal and institutional dimensions). Those sensitive factors were leverage points that need to be considered and encouraged in their implementation so that the sustainability of oil palm farming system continues to increase.

Keywords: oil palm, sustainability index, MDS analysis, peatland

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan ekspor dan pendapatan petani, diantaranya diusahakan di lahan gambut. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan usahatani terutama akibat penurunan kualitas lingkungan. Analisis keberlanjutan usaha tani kelapa sawit ini mempunyai tujuan untuk menilai indeks keberlanjutan usaha tani kelapa sawit dari beberapa manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma, dan menentukan faktor peka atau titik ungit sebagai saran dalam meningkatkan keberlanjutan usaha tani kelapa sawit khususnya di lahan gambut, dengan menggunakan analisis *Multi-Dimensional Scalling* (MDS) berdasarkan lima dimensi yaitu ekonomi, ekologi, sosial, teknologi, serta hukum dan kelembagaan. Analisis MDS dilakukan terhadap enam model manajemen pengelolaan usaha tani kelapa sawit. Hasil analisis menunjukkan manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma binaan perusahaan swasta (PT. Agro Lestari) di lahan gambut merupakan model manajemen pengelolaan usaha tani kelapa sawit yang paling tinggi tingkat keberlanjutannya, dengan indeks keberlanjutan 60,2 atau masuk katagori cukup berkelanjutan. Faktor peka yang dapat menjadi titik ungit dalam dimensi ekonomi meliputi akses pasar, luas lahan garapan petani, dan harga TBS yang layak, faktor peka dalam dimensi ekologi adalah kematangan lahan gambut, dan keberadaan tanaman *cover crops* sebagai tanaman penutup tanah. Faktor peka pada dimensi sosial di antaranya isu negatif kelapa sawit, peran kelompok tani dan ketersediaan tenaga kerja di tingkat lokal, faktor peka dalam dimensi teknologi adalah ketersediaan fasilitas jalan,

sedangkan faktor peka pada dimensi hukum dan kelembagaan adalah efektivitas pendamping, kemudahan perijinan, serta keterpaduan dan kontribusi lembaga yang ada di daerah terkait usaha tani kelapa sawit. Faktor-faktor peka tersebut, merupakan titik ungkit yang perlu diperhatikan dan didorong dalam implementasinya agar keberlanjutan usaha tani kelapa sawit terus meningkat.

Kata kunci: kelapa sawit, indeks keberlanjutan, analisis MDS, lahan gambut

PENDAHULUAN

Luas lahan gambut di Indonesia sekitar 7,2 juta ha dengan timbunan karbon 18,8 juta ton. Riau memiliki lahan gambut terluas 3,89 juta ha dengan karbon 14,6 juta ton (Masganti *et al.*, 2014). Pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian banyak menimbulkan polemik, terutama komentar negatif terhadap pengusahaan tanaman perkebunan dan pangan di lahan gambut yang berada di dalam kawasan hutan. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, yaitu akan terganggunya potensi karbon yang tersimpan dalam gambut, dan juga dikhawatirkan menurunkan kemampuan gambut dalam menimbun karbon (*carbon sink*), terganggunya keanekaragaman hayati gambut, serta kekhawatiran dengan perubahan penggunaan lahan gambut tersebut akan menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat besar (Suwanda, 2016). Selanjutnya dikemukakan bahwa penelitian di lahan gambut yang ditanami karet, menunjukkan bahwa pH tanah dan air, serta tinggi muka air tanah yang sangat mempengaruhi produktivitas dan kelestarian lingkungan. Permasalahan lain juga terjadi pada kerusakan lingkungan yang semakin intensif karena limbah domestik, residu penggunaan pestisida, herbisida serta pupuk, berpengaruh negatif terhadap produktivitas, yang dapat memperpendek usia ekonomis kelapa sawit (Wigena *et al.*, 2009).

Dalam aspek ekonomi, salah satu kunci penting adalah akses pasar dan harga produk hasil petani yang menarik. Petani mengharapkan agar harga stabil dengan nilai tukar petani (NTP) yang tinggi. Untuk meningkatkan harga tandan buah kelapa sawit (TBS), pemerintah menghapus pungutan ekspor kelapa sawit, minyak kelapa

sawit mentah dan produk turunannya. Irawan (2007) mengemukakan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan permintaan yang dibutuhkan konsumen. Widayana (2016) merekomendasikan agar pemerintah perlu menetapkan harga TBS untuk menjaga kestabilan harga.

Kay dan Alder (2000) mengemukakan bahwa beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan pembangunan berkelanjutan adalah menyangkut aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan kelembagaan. Perkebunan kelapa sawit memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan multifungsi tersebut dapat memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, bagi pencapaian *sustainability development goals* (SDGs). Kontribusi industri minyak sawit dalam aspek ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta sumber devisa dan pendapatan negara. Dalam aspek sosial antara lain untuk pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi *degraded land*, konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan (Purba dan Sipayung, 2017).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, nilai pendapatan komoditas unggulan tanaman perkebunan mencapai Rp 357 triliun (Yunita dan Wawa, 2018), yang sebagian besar bersumber dari kontribusi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan salah satu

komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara sesudah minyak dan gas, bahkan Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun sebagian besar ekspor minyak sawit dari Indonesia adalah dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang didapatkan relatif kecil (Utami *et al.*, 2017; Purba dan Sipayung, 2017; Sinaga dan Hendarso, 2012; Panjaitan *et al.*, 2014).

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sudah dikelola secara profesional oleh perusahaan yang bermodal besar, dengan memperhatikan mulai dari persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan budidaya lainnya hingga ke aspek prosesing dan pasca panen. Namun demikian masih terdapat ketimpangan yang besar, dimana keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit belum diikuti oleh pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan secara ekologi lahan gambut mengalami degradasi yang berakibat pada produktivitas lahan semakin rendah (Nasrul *et al.*, 2012). Di samping itu keberlanjutan usaha tani kelapa sawit berkorelasi dengan kesejahteraan petaninya, sehingga manajemen pola tanam yang menyangkut peremajaan atau *re-planting* perlu mendapat perhatian. Hal ini terkait dengan umur produktif kelapa sawit yaitu 25 tahun, sehingga perlu peremajaan. Kelapa sawit mulai berproduksi pada tahun ke-4, diikuti pertumbuhan produksi cepat pada usia muda (4-10 tahun), usia 11-15 tahun laju pertumbuhan produksi lambat, kemudian pada usia 16-25 tahun produksi menurun, secara ekonomi pola ini akan berkorelasi dengan pendapatan petani (Wigena *et al.*, 2009).

Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengelolaan kelapa sawit adalah tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan ditetapkan ISPO di antaranya untuk memposisikan pembangunan

kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup (Kospa, 2016). Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mereduksi kampanye negatif kelapa sawit di Uni Eropa, meski ada respon sebaliknya yang kurang mendukung keputusan tersebut (Hidayat *et al.*, 2018). Selain itu, studi kasus tentang keberlanjutan usaha tani kelapa sawit di wilayah perbatasan juga pernah dilakukan dengan titik perhatian banyak ketidakberlanjutan dilihat dari sisi kelembagaan dan aset jalan (Ngadi dan Noveria, 2017). Penelitian bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan usahatani kelapa dari beberapa pola manajemen pengelolaan dan faktor ungkit yang dapat meningkatkan keberlanjutan usahatani kelapa sawit, khususnya di lahan gambut.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, di lokasi lahan gambut dan non gambut yaitu:

1. Kecamatan Tapung, yaitu di Desa Petapahan, Desa Pelambaian, Desa Kijang Rejo, yang merupakan sentra usahatani kelapa sawit di lahan gambut.
2. Kecamatan Bangkinang, di Desa Bukit Payung, dan Kecamatan Tapung di Desa Pelambaian dan Desa Kijang Rejo, yang merupakan sentra usahatani kelapa sawit di lahan non-gambut.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan merupakan data yang digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit di lahan gambut, yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, ekologi, teknologi serta hukum dan kelembagaan

(Hidayat *et al.*, 2018; Kementan, 2015; Suwanda, 2016; Ngadi dan Noveria, 2017). Pada masing-masing aspek terdapat atribut yang akan dilakukan penilaian, yaitu:

- Aspek ekonomi: luas garapan, produktivitas, tingkat penghasilan petani, aspek pasar, harga kelapa sawit, efisiensi ekonomi. Aspek ekonomi ini merupakan faktor penting terutama terkait dengan nilai dan skala ekonomi yang menguntungkan bagi petani. Jika menguntungkan secara ekonomi maka akan mendukung keberlanjutan usaha tani sawit.
- Aspek ekologi: tingkat kematangan lahan gambut, elevasi tinggi muka air, pH tanah, pH air, kondisi tanaman penutup tanah, pengelolaan kesuburan tanah. Aspek ekologi merupakan faktor yang mendukung kelestarian lingkungan, sehingga jika kelestarian lingkungan terjaga maka akan mendukung keberlanjutan usaha tani sawit.
- Aspek sosial: tingkat pendidikan formal petani, persepsi petani terhadap isu lingkungan akibat kelapa sawit, intensitas kegiatan penyuluhan, ketersediaan informasi tentang pertanian keberlanjutan, pengembangan kelompok tani, ketersediaan tenaga kerja. Aspek sosial merupakan faktor penting terkait dengan respon dan adopsi informasi dalam mendukung usaha tani sawit.
- Aspek teknologi: ketersediaan teknologi budidaya (GAP), efektivitas penerapan teknologi budidaya, dukungan sarana irigasi, dukungan sarana jalan, penerapan sarana mekanisasi, penerapan standar produk. Aspek teknologi merupakan syarat dalam mencapai efisiensi usaha. Jika aspek teknologi tersedia maka akan mendukung keberlanjutan usaha tani sawit.
- Aspek kelembagaan: ketersediaan lembaga pendukung usahatani kelapa sawit, efektivitas lembaga pendamping, ketersediaan regulasi antara lain perijinan,

kontribusi lembaga pendukung, eksistensi dan keselarasan program pertanian berkelanjutan antara pusat dan daerah. Aspek kelembagaan merupakan prasyarat agar usaha tani sawit efisien dan lancar sehingga akan berkelanjutan.

Rincian yang lebih detail tentang atribut, skor dan skala penilaian tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit disusun dalam bentuk matrik sekaligus menjadi kuisioner terstruktur dalam analisis ini, seperti dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Atribut, skor dan skala penilaian

Atribut	Skor	Skala Penilaian
Ekonomi:	1 s/d 10	Nilai 1 (buruk) s/d 10 (sangat baik)
- Luas lahan garapan	10	
- Tingkat penghasilan petani		
- Aspek pasar		
- Harga kelapa sawit		
- Efisiensi ekonomi		
Ekologi:	1 s/d 10	Nilai 1 (buruk) s/d 10 (sangat baik)
- Tingkat kematangan gambut	10	
- Elevasi tinggi muka air		
- pH tanah		
- pH air		
- Kondisi tanaman penutup tanah		
- Pengelolaan kesuburan tanah		
Sosial:	1 s/d 10	Nilai 1 (buruk) s/d 10 (sangat baik)
- Tingkat pendidikan	10	
- Persepsi petani terhadap isu lingkungan		
- Intensitas penyuluhan		
- Ketersediaan informasi		
- Pengembangan Kelompok Tani		
- Ketersediaan tenaga kerja		
Teknologi:	1 s/d 10	Nilai 1 (buruk) s/d 10 (sangat baik)
- Ketersediaan teknologi budidaya	10	
- Efektivitas penerapan teknologi budidaya		
- Dukungan sarana		

Atribut	Skor	Skala Penilaian
irigasi		
- Dukungan sarana jalan		
- Penerapan mekanisasi		
- Penerapan standar mutu		
Kelembagaan:	1 s/d	Nilai 1 (buruk)
- Ketersediaan lembaga pendukung	10	s/d 10 (sangat baik)
- Efektivitas lembaga pendamping		
- Ketersediaan regulasi		

Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif yang bersumber dari Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kampar dan BPTP Riau. Data primer diperoleh melalui diskusi dengan Pimpinan Disbun dan staf, wawancara melalui kuisioner terstruktur dengan petani kelapa sawit sebagai responden, dan observasi langsung ke lahan usahatani milik petani.

Pemilihan Sampel Pengamatan

Pemilihan sampel responden petani ditentukan dengan pendekatan *cluster purposive sampling*, yaitu dipilih responden sebagai perwakilan dari setiap kelompok status pengusahaan kelapa sawit atau kelompok berdasarkan manajemen pengelolaannya di Kabupaten Kampar. Terdapat enam kelompok petani kelapa sawit berdasarkan status manajemen pengelolaan atau pembinaan oleh perusahaan inti dan jenis lahan usaha, yaitu sebagai berikut (Tabel 2):

1. Petani kelapa sawit sebagai plasma dari perusahaan swasta (PT. Agro Lestari, PT. Sinar Mas) di lahan gambut.
2. Petani kelapa sawit sebagai plasma dari perusahaan pemerintah (PTPN V) di lahan gambut.

3. Petani kelapa sawit swadaya di lahan gambut.
4. Petani kelapa sawit sebagai plasma dari perusahaan swasta (PT. Agro Lestari, PT. Sinar Mas) di lahan non-gambut.
5. Petani kelapa sawit sebagai plasma dari perusahaan pemerintah (PTPN V) di lahan non-gambut.
6. Petani kelapa sawit swadaya di lahan non gambut.

Jumlah responden masing-masing kelompok adalah enam petani responden sehingga total responden sebanyak 36 petani. Hal tersebut didasarkan atas jumlah minimal atribut dari masing-masing dimensi yaitu enam dan atas dasar persyaratan cuplikan untuk data non-parametrik.

Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menilai tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit, didasarkan atas data primer yang diperoleh melalui pendekatan survei terstruktur, yang sumber datanya adalah petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar, Riau. Selanjutnya data tersebut diolah dengan *multi-dimensional scalling* (MDS) (Jung, 2013). Secara sederhana skala nilai keberlanjutan ditentukan oleh fungsi dari nilai atribut aspek ekonomi, ekologi, sosial, teknologi dan nilai atribut aspek kelembagaan, dengan formula:

$$IKb = f(E, L, S, T, K)$$

Dimana:

- IKb = skala nilai indeks keberlanjutan
E = skor atribut aspek ekonomi
L = skor atribut aspek ekologi
S = skor atribut aspek sosial
T = skor atribut aspek teknologi
K = skor atribut aspek kelembagaan

Tabel 2. Lokasi dan jumlah sampel petani responden di Kabupaten Kampar

Manajemen Pengelolaan	Lahan Gambut (Lokasi dan jumlah responden)	Lahan Non-Gambut (Lokasi dan jumlah responden)	Jumlah
Petani Plasma Perusahaan Swasta	Desa Petapahan, Kecamatan Tapung (6)	Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang (6)	12
Petani Plasma PTPN 5	Desa Pelambaian, Kecamatan Tapung (6)	Desa Pelambaian, Kecamatan Tapung (6)	12
Petani Swadaya	Desa Kijang Rejo, Kecamatan Tapung (6)	Desa Kijang Rejo, Kecamatan Tapung (6)	12
Jumlah	18	18	36

Metode MDS menggunakan proses ordinasi *rapid appraisal for oil palm (Rap Palm)*. Kriteria atau atribut pada setiap aspek tersebut merupakan hal penting dalam menilai status keberlanjutan secara cepat (*rapid appraisal*) dengan menggunakan metode *multivariable non-parametric* yang disebut *multidimensional scaling* (Susilo, 2003). Penilaian (skoring) setiap atribut dilakukan dalam skala ordinal berdasarkan kriteria berkelanjutan, kemudian dilakukan analisis MDS untuk menentukan ordinasi dan nilai (Sudiono *et al.*, 2017). Selanjutnya akan diperoleh skala nilai indeks keberlanjutan (IKb) untuk masing-masing dimensi (Fisheries Communication, 1999). Skala nilai >75 artinya IKb baik, skala nilai 50 – 75 artinya IKb cukup, 25 – 50 artinya IKb cukup dan skala nilai <25 artinya IKb buruk. Serta dilakukan analisis *leverage* untuk menilai sensitivitas atau faktor peka. Nilai atau grafik *leverage* yang tinggi menunjukkan tingkat kepekaan tinggi, sehingga atribut itulah yang menjadi titik ungkit dan harus mendapat perhatian untuk meningkatkan indeks keberlanjutan usaha tani kelapa sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usahatani Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki luas 1.098.346 ha, terdiri atas 20 kecamatan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Kampar tahun 2018, dari luasan tersebut di antaranya terdiri atas:

- Perkebunan kelapa sawit seluas 408.977 ha terdiri atas tanaman produktif (TM) 383.262 ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) 26.993 ha dan tanaman tua atau rusak (TTR) 702 ha. Sentra kelapa sawit di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Siak Hulu, Kampar Kiri, Kampar, Salo, Kuok dan Tapung Hilir. Status pengelolaannya dalam bentuk (1) Perkebunan Rakyat 322.474 ha (Plasma dan Swadaya) sebagian besar perkebunan kelapa sawit (225.600 ha) yang terdiri atas TM 204.056 ha, TBM 20.046 ha dan TTR 702 ha, melibatkan sekitar 86.170 KK petani sawit, (2) Perkebunan Besar Negara (PTPN 5) seluas 50.831 ha dan (3) Perkebunan Swasta (PT. Agro Lestari, PT. Sinar Mas) seluas 135.700 ha. Diantara perkebunan rakyat tersebut diatas, berada di Kecamatan Tapung seluas 35.790 ha (20.457 KK petani), Kecamatan Tapung Hulu seluas 55.970 ha (16.009 KK petani) dan di Kecamatan Tapung Ilir seluas 37.994 ha (20.793 KK petani).
- Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 200.000 ha.
- Luas kelapa sawit di lahan gambut tahun 2016 adalah seluas 4.000 ha dan bahkan pada tahun 2017, di antaranya 1.800 ha berada di kawasan lindung dan 3.385 ha di kawasan budidaya.

- d. Status pengelolaan kelapa sawit perkebunan rakyat, terdiri atas: (1) Swadaya murni 109.053 ha, (2) Pola Plasma dalam bentuk Pirtrans PTPN 5 seluas 28.408 ha, Pirtrans Swasta seluas 21.088 ha; Pola Kemitraan dengan PTPN 5 seluas 2.476 ha dan pola kemitraan dengan Swasta seluas 39.432 ha.

Informasi lain yang berkaitan dengan agribisnis kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar adalah:

- a. Rata-rata produktivitas TBS (PR, PTPN, swasta) saat ini adalah 15,306 ton per ha.
- b. Dalam tahun 2018, rencana *re-planting* kelapa sawit dari dana BPDKS seluas 5.600 ha dan 5.800 ha, dengan skema dalam bentuk bantuan hibah Rp 25 juta per hektar atau maksimum Rp. 60 juta per 2 hektar.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam pengusahaan kelapa sawit, adalah: (a) terjadi sengketa lahan adat yang sudah beralih kepemilikannya sejak jaman Belanda, (b) masalah status fungsi lahan yang ada di KSA, (c) regulasi pemerintah tentang PP moratorium.
- e. Dalam aspek manajemen usaha, telah berkembang pengelompokan petani mandiri dalam bentuk usaha bersama (Pujakesuma) yang sekarang sudah terbentuk 5 kelompok di Kecamatan Tapung.
- f. Khusus BUMN (PTPN 5) dan Swasta telah memiliki sertifikasi ISPO, bahkan BUMN telah memiliki RSPO. Namun implementasinya di lapangan, terutama di lahan plasma petani belum seperti yg diharapkan.
- g. Terkait dengan harga TBS di tingkat petani, Pemda sudah menetapkan harga TBS sesuai dengan kualitas berbasis umur tanaman.
- h. Status plasma belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan karena perusahaan inti tidak berfungsi membina seperti yang diharapkan dan petani plasma merasa tidak punya keterikatan dengan inti.

Karakteristik petani sawit di Kampar yang pada umumnya merupakan peserta transmigrasi dari Jawa dan Sumatera Utara, sampai saat ini sebagian besar memiliki pengalaman bertani lebih dari 15 tahun, dengan pemilikan lahan usaha tani sawit sebagian besar adalah 2 ha. Umumnya status lahan usaha tani kelapa sawit adalah sertifikat hak milik (SHM). Pendidikan formal petani sawit sebagian besar adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Karakteristik petani ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik petani sawit di Kampar

No	Karakter	Proporsi (%) diurutkan mulai dari % besar
1.	Pengalaman bertani:	
	- > 15 tahun	59,3
	- 10 – 15 tahun	21,8
	- 5 – 10 tahun	12,5
	- < 5 tahun	6,4
2.	Luas pemilikan lahan usaha sawit:	
	- 2 ha	59,3
	- 4 ha	21,8
	- 6 ha	9,3
	- 3 ha	6,2
	- 8 ha	3,4
3.	Status pemilikan lahan sawit:	
	- Sertifikat hak milik (SHM)	71,8
	- SKT Camat	28,2
4.	Pendidikan formal petani:	
	- SLTP	37,5
	- SLTA	28,1
	- S1	18,7
	- SD	15,7

Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit pada Beberapa Pola Manajemen Pengelolaan dan Tipe Lahan

Pada usahatani kelapa sawit rakyat di Kampar dikenal dua pola manajemen, yaitu swadaya (mandiri) dan plasma, baik di lokasi usaha lahan gambut maupun non gambut.

Usahatani kelapa sawit rakyat swadaya dalam pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan pola pemasarannya lebih bersifat bebas, bergantung pada ketersediaan modal dan harga TBS di pasar. Sebaliknya pada usahatani kelapa sawit rakyat plasma, pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil sawit banyak bergantung pada perusahaan inti.

Analisis Keberlanjutan Kelapa Sawit

Hasil analisis tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit berdasarkan penilaian terhadap masing-masing atribut dari setiap dimensi ditampilkan pada Tabel 4. Dalam dimensi ekonomi yang menunjukkan kelas cukup berkelanjutan adalah berturut-turut untuk manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan gambut (PSG) yaitu 56,3; manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma PTPN V di lahan gambut (PPNG) yaitu 51,0; manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan non-gambut (SG) yaitu 50,8 dan manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan non-gambut (SNG) yaitu 50,8. Dalam dimensi ekonomi pada manajemen pengelolaan kelapa sawit plasma di lahan gambut (PPG) dan manajemen pengelolaan kelapa sawit plasma PTPN V (PSNG) berada pada kelas kurang berkelanjutan yaitu skala nilai masing-masing 49,1.

Berdasarkan dimensi ekologi, nilai skala keberlanjutan masing-masing manajemen pengelolaan berada pada kelas cukup berkelanjutan yaitu pada manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan non-gambut (PPNG), manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan non-gambut (SNG) dan manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan gambut (PSG) dengan nilai skala masing-masing berturut-turut 56,1; 55,7; dan 50,9. Model manajemen lainnya kurang berkelanjutan, yaitu manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma PTPN V di lahan gambut (PPG), manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan non-gambut (PSNG) dan manajemen pengelolaan kelapa

sawit petani swadaya di lahan gambut (SG), dengan nilai skala masing-masing berturut-turut 48,8; 48,6; dan 45,6.

Berdasarkan dimensi sosial, nilai skala keberlanjutan menunjukkan cukup berkelanjutan, yaitu pada manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma PTPN V di lahan gambut (PPG), manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan gambut (PSG) dan manajemen pengelolaan kelapa sawit plasma PTPN V di lahan non-gambut (PPNG) dengan nilai masing-masing berturut-turut 57,6; 57,1 dan 53,6. Manajemen pengelolaan kelapa sawit plasma swasta di lahan non-gambut, manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan non-gambut dan manajemen pengelolaan kelapa sawit swadaya di lahan gambut menunjukkan kurang berkelanjutan, dengan nilai skala masing-masing berturut-turut 30,2; 25,4; dan 23,8.

Berdasarkan dimensi teknologi, skala nilai keberlanjutan umumnya kurang berkelanjutan, kecuali pada manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan gambut (PSG) yang nilai skalanya cukup yaitu 61,8. Demikian juga pada dimensi hukum dan kelembagaan umumnya kurang berkelanjutan, kecuali pada manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta (PSG) yang nilai skalanya cukup yaitu 74,7.

Hasil pada Tabel 4 dan Gambar 1 menunjukkan pola manajemen pengelolaan kelapa sawit plasma swasta di lahan gambut (PSG) mempunyai nilai skala keberlanjutan yang paling baik dibanding dengan manajemen pengelolaan lainnya. Untuk semua dimensi termasuk dimensi ekonomi, ekologi, sosial, teknologi dan hukum pola PSG menunjukkan nilai skala diatas 50.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh kenyataan di lapangan bahwa petani yang bermitra dengan swasta, mempunyai produktivitas kelapa sawit (TBS) yang umumnya mencapai lebih dari 2 ton/ha per bulan atau 24-30 ton/ha per tahun. Produktivitas petani swadaya atau yang tanpa kemitraan umumnya tidak

Tabel 4. Skala nilai indeks keberlanjutan (IKb) pada setiap dimensi dan manajemen pengelolaan

Dimensi	Skala Nilai Indeks Keberlanjutan (Ikb)					
	PSG	PPG	SG	PSNG	PPNG	SNG
Ekonomi	56,3486	49,1275	50,8430	49,1167	51,0817	50,8430
Ekologi	50,9771	48,8735	45,6312	48,6471	56,1108	55,7971
Sosial	57,1442	57,6514	23,8276	30,2207	53,6189	25,4693
Teknologi	61,8579	41,9863	27,1332	27,3466	31,7372	33,2674
Hukum dan Kelembagaan	74,7310	46,6988	10,0000	32,5736	44,7515	10,0000
Rata-rata IKb	60,2118	48,8675	31,4870	37,5809	47,4600	35,0754

Keterangan:

PSG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan gambut

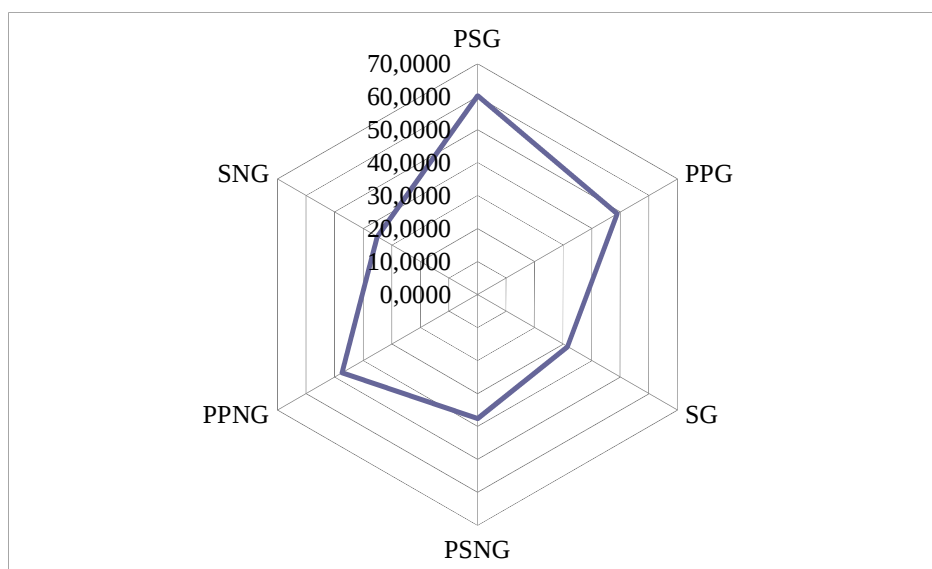
PPG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma PTPN V di lahan gambut

SG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan gambut

PSNG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta di lahan Non gambut

PPNG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma PTPN V di lahan non gambut

SNG = manajemen pengelolaan kelapa sawit petani swadaya di lahan non gambut



Gambar 1. Diagram Ikb manajemen pengelolaan kelapa sawit

mencapai 2 ton. Produktivitas kelapa sawit yang bermitra lebih tinggi karena sistem manajemen kebun sudah ditentukan oleh perusahaan, seperti pengelolaan budidaya termasuk pemupukan dan penanganan hama dan penyakit tanaman, seleksi buah, dan pemanenan.

Berdasarkan sisi pemasaran dan perlindungan hukum, posisi petani yang bermitra akan lebih terjamin. Menurut Sinaga dan Hendarto (2012) pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit hendaknya dilaksanakan dalam sistem agroindustri yang terintegrasi antara perkebunan dan pabrik yang dikelola petani menuju terwujudnya petani pekebun yang

mandiri, melalui pemberdayaan masyarakat pekebun. Manajemen pengelolaan yang paling rendah adalah manajemen pengelolaan petani swadaya (SG), terutama dalam dimensi kelembagaan, teknologi dan sosial.

Hasil pengamatan di lapangan, beberapa aspek atau dimensi tersebut memang belum baik, meliputi: akses ke lembaga pendukung dan lembaga penyuluhan, perijinan usaha kelapa sawit, ketersediaan dan efektivitas penerapan teknologi budidaya (GAP), terbatasnya dukungan sarana irigasi, sarana jalan, dan mekanisasi. Khusus dalam dimensi sosial, petani swadaya pada umumnya pendidikan petani rendah, ketersediaan informasi tentang pertanian berkelanjutan tidak ada, eksistensi kelompok tani tidak jelas, dan penerapan standar produk tidak menjadi perhatian utama.

Berdasarkan hasil olah *RapPalm* terhadap 6 model manajemen pengelolaan kelapa sawit di Kampar menunjukkan bahwa secara umum berada dalam kelas “kurang berkelanjutan”, dan hanya manajemen pengelolaan kelapa sawit petani plasma swasta atau PSG (PT. Agro Lestari) yang kelas keberlanjutannya cukup dengan nilai skala 60,2.

Faktor Peka yang Mempengaruhi Keberlanjutan

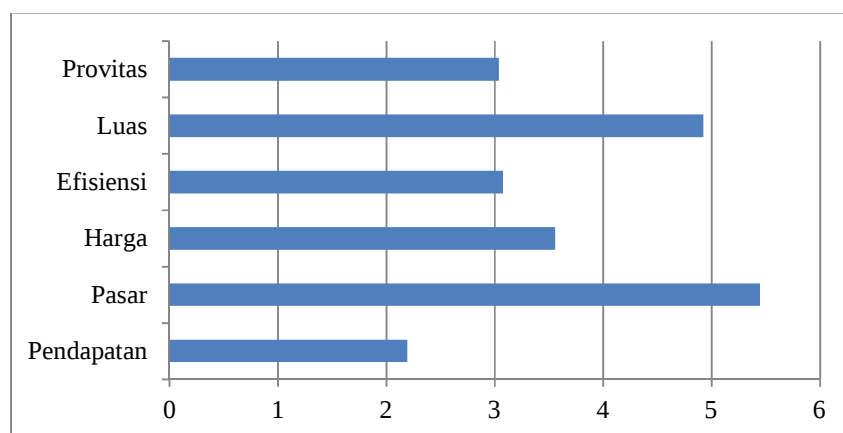
Untuk menilai faktor peka atau titik ungit yang dominan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha tani adalah dengan menggunakan nilai atau *leverage analysis* dalam

olahan *RapPalm*. Semakin besar nilai *leverage analysis* artinya semakin peka atribut tersebut dalam mempengaruhi keberlanjutan.

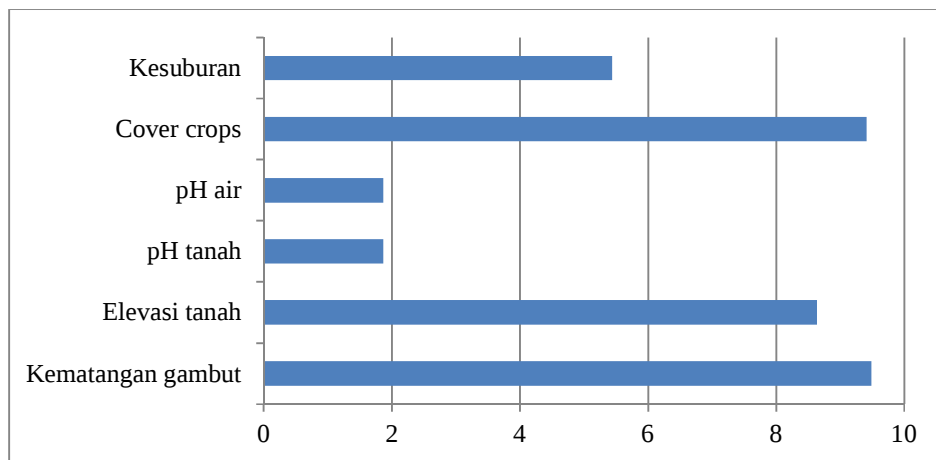
Menurut pendekatan dimensi ekonomi, terdapat enam atribut yang dinilai berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit di lahan gambut maupun non-gambut di Kabupaten Kampar. Atribut atau faktor yang paling peka dalam mempengaruhi keberlanjutan usaha tani kelapa sawit adalah akses pasar, luas usaha tani dan harga kelapa sawit, seperti tertera pada Gambar 2.

Akses pasar merupakan faktor peka dalam dimensi ekonomi yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit. Petani umumnya melakukan panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dua minggu sekali, kemudahan petani untuk menjual TBS menjadi hal yang penting bagi perputaran perekonomian mereka.

Beragam perbedaan saluran pemasaran memberikan indikasi perbedaan tingkat harga yang diterima petani dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran, seperti biaya angkut, biaya transportasi ke pabrik, biaya susut buah, dan biaya-biaya lainnya. Saluran yang paling banyak digunakan oleh petani swadaya adalah saluran petani-pedagang pengumpul-pabrik, saluran tersebut memiliki margin tertinggi dan *farmer's share* yang rendah (Sumartono *et al.*, 2018). Harga TBS merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada



Gambar 2. Faktor peka dimensi ekonomi

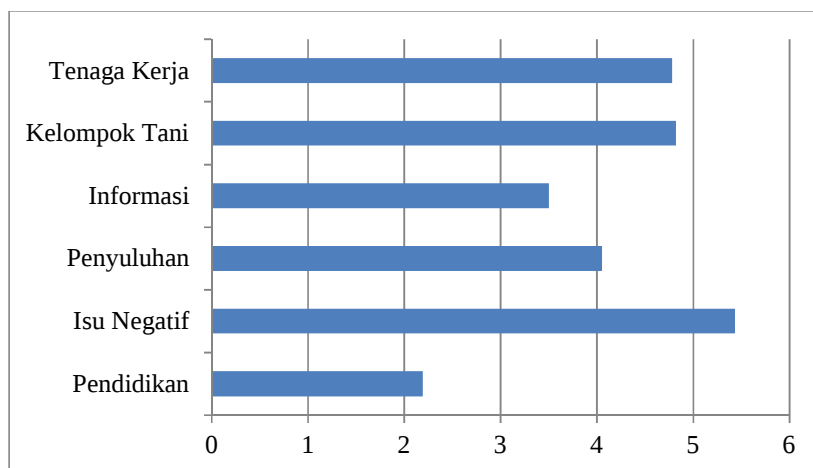


Gambar 3. Faktor peka dimensi ekologi

pengelolaan lahan gambut.

Hasil penelitian Nasril *et al.* (2012) menyatakan bahwa pada dimensi ekonomi faktor yang berpengaruh adalah struktur permodalan, harga TBS, dan sarana produksi. Faktor harga merupakan insentif yang menarik bagi petani untuk mengusahakan suatu komoditas pertanian. Dalam hal ini, prospek perkebunan kelapa sawit dikatakan baik bila dapat meningkatkan kesejahteraan petaninya, untuk meningkatkan

kesejahteraan diperlukan peningkatan produktivitas, namun bila tidak diikuti oleh perbaikan harga yang diterima petani tentulah pendapatannya tidak optimal (Kospa, 2016). Realita di lapangan menunjukkan bahwa petani swadaya umumnya melakukan pemupukan berdasarkan harga kelapa sawit, jika harga tidak bagus maka tanaman tidak akan dipupuk, hal ini tentu akan berimbas pada produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan.



Gambar 4. Faktor peka dimensi sosial

Pada dimensi ekologi (Gambar 3), enam faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tani kelapa sawit khususnya yang paling peka di lahan gambut adalah kematangan lahan gambut, keberadaan tanaman *cover crops* sebagai tanaman penutup tanah di antara tanaman kelapa sawit dan tinggi muka air tanah (elevasi).

Kematangan gambut sangat menentukan produktivitas lahan gambut (Dariah *et al.*, 2014), gambut dengan kematangan yang tinggi mempunyai ketersediaan hara lebih banyak, lebih mampu menyerap dan menyimpan air, dan struktur tanahnya lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Gambut yang tingkat kematangannya tinggi atau disebut saprik akan cenderung lebih halus dan lebih subur. Di samping itu, kematangan gambut sangat menentukan kemampuan dalam mengikat air, tanah gambut mempunyai kapasitas mengikat air (*water holding capacity*) yang relatif sangat tinggi atas dasar berat kering (Suswati *et al.*, 2011).

Salah satu faktor kunci dalam pengelolaan kelapa sawit di lahan gambut adalah pengaturan tata air karena kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus air, bahkan perkebunan kelapa sawit dapat mengganggu persediaan air tanah untuk tanaman lain di luar kebun kelapa sawit (Utami *et al.*, 2017, Saragih dan Hariyadi, 2016; Nasrul *et al.*, 2012). Dengan demikian, keberadaan *cover crops* yang dapat menahan laju kehilangan air dan elevasi air tanah merupakan faktor yang penting bagi ketersediaan air tanah. Faktor peka tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan produktivitas tanaman kelapa sawit.

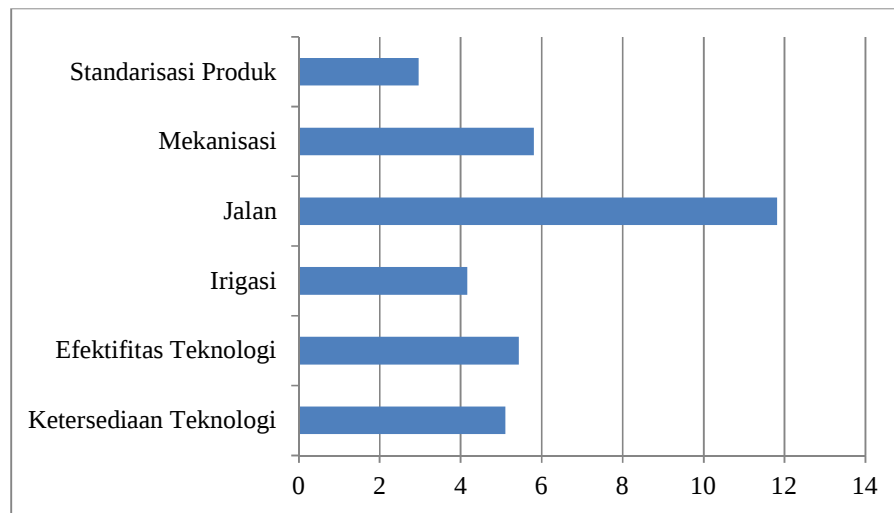
Menurut dimensi sosial, dari enam faktor atau atribut, di antaranya yang peka mempengaruhi tingkat keberlanjutan usaha tani kelapa sawit adalah isu negatif tentang usahatani kelapa sawit, peran kelompok tani dan ketersediaan tenaga kerja. Isu negatif dimaksud adalah isu tentang hal negatif yang isunya di

tingkat global. Perbandingan untuk keenam atribut tersebut tertera pada Gambar 4.

Isu negatif tentang usahatani kelapa sawit baik di tingkat global maupun nasional dapat menjadi faktor penghambat dalam keberlanjutannya. Isu negatif di tingkat global dapat menjadi hambatan non tarif bagi perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan mengakibatkan lemahnya daya saing kelapa sawit Indonesia (Sinaga dan Hendarto, 2012).

Salah satu isu yang penting adalah banyaknya konversi hutan dan lahan gambut menjadi lahan kelapa sawit di Indonesia yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global, dan isu pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang menyebabkan polusi udara, hal ini tentunya akan mempengaruhi agribisnis kelapa sawit nasional. Isu negatif lainnya seperti pencemaran oleh limbah kelapa sawit, serta pestisida dan pupuk kimia yang disebabkan oleh intensifikasi kebun kelapa sawit (Kospa, 2016). Hasil penelitian Utami *et al.* (2017) ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada penurunan kuantitas air tanah (kekeringan), pencemaran air dan berkurangnya populasi satwa.

Isu-isu negatif ini perlu mendapat perhatian pemerintah dan *stakeholders* terkait untuk menjamin keberlanjutan usahatani kelapa sawit. Selain itu sangat penting untuk membangun kepedulian petani kelapa sawit terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian diperlukan kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dapat memberikan dampak ekonomi namun memperhatikan lingkungan, salah satunya dengan sertifikasi ISPO/RSPO (Utami *et al.*, 2017). Apabila perusahaan perkebunan telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO ini dengan baik, maka pasar dunia akan melirik Indonesia sebagai penghasil CPO yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan (Panjaitan 2014).



Gambar 5. Faktor peka dimensi teknologi

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor peka atau pengungkit dalam keberlanjutan usahatani kelapa sawit. Menurut Wigena *et al.* (2009), formulasi masalah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan adalah kompetensi dan keterampilan petani plasma dan pekerja belum memadai untuk membangun perkebunan berkelanjutan, karena tenaga kerja yang memiliki keterampilan akan berpengaruh positif terhadap optimalisasi sarana produksi. Ketersediaan tenaga juga merupakan salah satu faktor yang dapat memacu perluasan areal tanam dan peningkatan produksi kelapa sawit (Triyono *et al.*, 2015).

Dimensi teknologi (Gambar 5), faktor peka yang berperan dalam mempengaruhi tingkat keberlanjutan pengelolaan usahatani kelapa sawit adalah ketersediaan fasilitas jalan yang merupakan bagian dari atribut dukungan sarana. Hal ini terutama terkait dengan kelancaran pengangkutan hasil panen kelapa sawit ke lokasi pabrik pengolahan. Kelancaran pengangkutan ini akan terkait juga dengan mutu kelapa sawit yang dipengaruhi oleh lamanya waktu pengangkutan sejak kelapa sawit dipanen di lokasi kebun

petani, sampai ke pabrik untuk diproses menjadi produk minyak nabati. Sarana jalan ini berpengaruh juga terhadap efisiensi dalam biaya pengangkutan. Kebun yang terdapat akses jalan yang lebar dan memadai dapat dimasuki kendaraan roda empat (truk/mobil bak), sehingga hasil panen dapat diangkut sekaligus. Jika tidak terdapat akses jalan, hasil panen harus diangkut dengan gerobak atau motor, sehingga pengangkutan hasil panen dilakukan berulang kali.

Dalam dimensi hukum dan kelembagaan, yang paling peka dalam mempengaruhi tingkat keberlanjutan usaha petani kelapa sawit adalah peran pendamping petani, regulasi pemerintah dan kontribusi lembaga yang ada dalam usahatani kelapa sawit, seperti tertera dalam Gambar 6. Hasil penelitian Triyono *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa faktor yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kebun kelapa sawit di lahan gambut adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan kelapa sawit. Peran pendamping dimaksud terutama peran penyuluh, dinas terkait dalam mengusahakan. Regulasi pemerintah terutama terkait dengan larangan pembakaran lahan pada saat mengolah

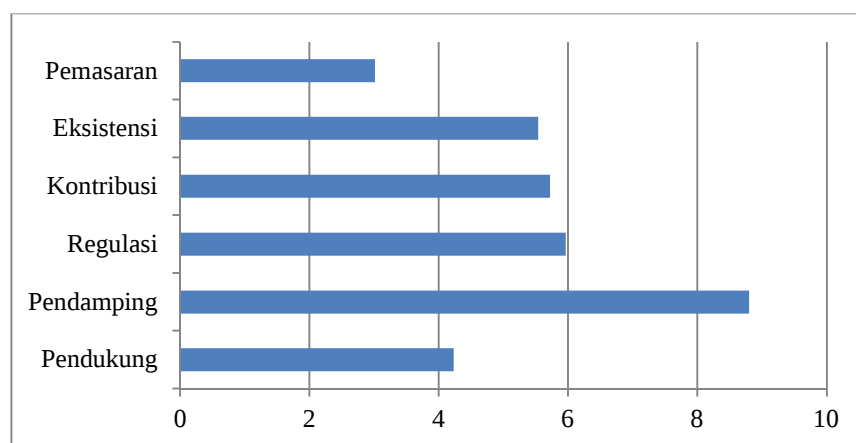
lahan, dan standar mutu hasil kelapa sawit petani, serta kewajiban perusahaan untuk menerapkan ISPO (Panjaitan *et al.*, 2014). Kontribusi lembaga yang ada dalam usaha tani kelapa sawit adalah terkait dengan efektivitas lembaga dimaksud terhadap pengembangan usaha tani kelapa sawit terutama di tingkat petani.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nasrul *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit di lahan gambut adalah pemberdayaan petani, sinkronisasi kebijakan, penyelesaian konflik lahan, dan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil olahan *leverage analysis* terdapat beberapa faktor yang nilai *leveragenya* tinggi artinya faktor atau atribut tersebut yang harus mendapat prioritas untuk ditangani sehingga keberlanjutan usaha tani sawit di Kampar dapat meningkat.

mempertahankan luas garapan lahan kelapa sawit petani melalui pemeliharaan yang intensif sehingga luas garap kelapa sawit yang produktif terjaga. Upaya mempertahankan kelayakan harga kelapa sawit petani dan untuk saat ini harga layak minimal Rp 1.200 per kg TBS. Untuk itu, petani harus menjaga mutu hasil kelapa sawitnya melalui panen kelapa sawit pada umur yang matang dan tidak terlalu lama (maksimal 2 hari) dalam proses pengangkutan setelah dipanen sampai TBS tersebut sampai di pabrik pengolahan.

Dalam dimensi ekologi, faktor peka yang harus diperhatikan adalah kematangan gambut, *cover crops*, dan elevasi tinggi muka air tanah. Untuk itu disarankan agar pemberian kompos dan mineral untuk mempercepat kematangan lahan gambut, serta mengupayakan penanaman *cover crops* atau tanaman penutup tanah sehingga iklim mikro lahan akan terjaga dan sekaligus menekan biaya pemeliharaan lahan kelapa sawit. Menjaga



Gambar 6. Faktor peka dimensi hukum dan kelembagaan

Dalam dimensi ekonomi, faktor atau atribut yang peka mempengaruhi tingkat keberlanjutan adalah akses pasar, luas garapan usaha kelapa sawit, dan harga jual kelapa sawit milik petani. Petani dan *stakeholders* perlu mempertahankan keberadaan pedagang pengumpul kelapa sawit, memperluas atau

elevasi tinggi muka air maka perlu memfungsikan saluran air di petakan dan saluran air keliling kebun terutama untuk lahan gambut juga sangat penting dilakukan.

Dalam dimensi sosial, faktor peka yang harus diperhatikan agar terjadi keberlanjutan usaha tani kelapa sawit adalah penyuluhan isu

negatif, kelestarian lahan dan lingkungan. Faktor lainnya adalah meningkatkan peran kelompok tani terutama terkait pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil kelapa sawit petani, selain ketersediaan tenaga kerja di tingkat lokal perlu mendapat perhatian.

Dalam dimensi teknologi, faktor peka yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tani kelapa sawit adalah ketersediaan fasilitas jalan, sehingga pemeliharaan terhadap fasilitas jalan mulai dari jalan kebun sampai jalan di luar kebun menuju pabrik pengolahan perlu diperhatikan. Dengan fasilitas jalan yang baik, maka akan berpengaruh terhadap dua hal pokok yaitu meningkatnya mutu kelapa sawit (TBS) karena kelancaran pengangkutan sehingga tidak memakan waktu lama dalam proses pengangkutan. Efisiensi biaya juga meningkat karena dengan fasilitas jalan yang bagus, sehingga biaya pengangkutan relatif lebih murah.

Dalam dimensi hukum dan kelembagaan, untuk menjaga tingkat keberlanjutan usaha tani kelapa sawit disarankan beberapa hal, yaitu: efektivitas lembaga pendamping antara lain dari dinas terkait dan perguruan tinggi. Kemudahan-kemudahan terkait ijin lokasi, ijin usaha perkebunan dan lain-lain, serta keterpaduan dan kontribusi lembaga yang ada di daerah terkait usaha kelapa sawit juga penting diperhatikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan enam manajemen pengelolaan petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar, manajemen pengelolaan petani kelapa sawit plasma perusahaan swasta (PT. Agro Lestari) di lahan gambut, merupakan yang paling tinggi tingkat keberlanjutannya, yaitu 60,2 atau masuk kategori cukup berkelanjutan.

Manajemen pengelolaan petani kelapa sawit lainnya (5 manajemen pengelolaan) berada pada kategori kurang berkelanjutan (nilai kurang dari 50,0). Dari 5 aspek yang dievaluasi, 3 aspek diantaranya manajemen plasma swasta (PT. Agro Lestari) menunjukkan perbedaan nilai yang

sangat tinggi yaitu pada aspek sosial, teknologi dan kelembagaan.

Atribut atau faktor yang peka yang dapat menjadi titik ungkit dalam meningkatkan keberlanjutan usahatani petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar, meliputi: 1) Dimensi ekonomi: akses pasar hasil kelapa sawit petani, luas lahan garapan petani, harga yang layak, 2) Dimensi ekologi: kematangan gambut, keberadaan tanaman *cover crops* sebagai tanaman penutup tanah, 3) dimensi sosial: isu negatif kelapa sawit, peran kelompok tani dan ketersediaan tenaga kerja di tingkat lokal, 4) dimensi teknologi: ketersediaan fasilitas jalan, serta 5) dimensi hukum dan kelembagaan: efektivitas pendamping, kemudahan perijinan, serta keterpaduan dan kontribusi lembaga yang ada di daerah terkait usaha tani kelapa sawit.

Faktor-faktor peka di atas, perlu didorong atau ditingkatkan agar keberlanjutan usaha tani kelapa sawit dapat terus meningkat. Saran konkrit yang dapat diaplikasikan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha tani sawit di Kampar adalah: (i) kontrak tahunan kerjasama pemasaran TBS antara petani (terutama petani swadaya) dengan perusahaan/pabrik pengolah TBS, terutama dalam menentukan harga dan jumlah pasokan; (ii) penanaman tanaman *cover crops* sebagai penutup tanah yang berguna untuk menekan gulma dan menjaga kesuburan lahan; (iii) perlu bantuan pemerintah dalam memelihara prasarana jalan dan saluran air, (iv) memfasilitasi lembaga pendamping dan pemberdayaan kelompok tani, (v) serta intensifikasi penyuluhan terkait manajemen pengelolaan usaha tani sawit khususnya di lahan gambut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan biaya penelitian dari Badan Litbang Pertanian melalui Proyek KP4S/SMARTD tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Dariah, A., Maftuah. E, dan Maswar. 2014. Karakteristik lahan gambut. Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. p. 16 – 29.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kampar. 2018. Data sekunder tanaman perkebunan di Kabupaten Kampar.
- Fisheries Communication. 1999. Rapfish project. [Hhttp://fisheries.com/project/rapfish.htm](http://fisheries.com/project/rapfish.htm)
- Hidayat, N.K., A. Offermans, dan P. Glassbergen. 2018. Sustainable palm oil as public responsibility? on the governance capacity of indonesian standard for sustainable palm oil (ISPO). *Agric. Hum Values*, 35: 223 – 242.
- Kementerian Pertanian RI (Kementan). 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11 Permentan OT 140/3/2015 tentang sistem sertifikasi kelapa kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
- Irawan, B. 2007. Fluktuasi harga, transmisi harga dan marjin pemasaran sayuran dan buah. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(4): 358 – 373.
- Jung, S. 2013. Lecture 8: multidimensional scaling, advanced applied of multivariate analysis STAT 2221. Fall 2013, Sungkyu Jung. Department of Statistics University of Pittsburgh. E-mail: sungkyu@pitt.edu. <http://www.stat.pitt.edu/sungkyu/AAMA/>.
- Kay, D. dan J. Alder. 2000. Coastal planning and management. Routledge New York.
- Kospa, H.S.D. 2016. Konsep perkebunan kelapa kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1): 1 – 10.
- Masganti, Wahyunto, A. Dariah, Nurhayati, R. Yusuf. 2014. Potensi karakteristik dan potensi pemanfaatan lahan gambut terdegradasi di Provinsi Riau. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(1): 59 – 66.
- Nasrul, B., H. Suwondo, Anthony, Idwar, S. Nedi, dan Sunardi. 2012. Model pengelolaan perkebunan kelapa kelapa sawit berkelanjutan pada lahan gambut di Provinsi Riau. *Jurnal Agrotek Tropika*, 1(1): 8 – 13.
- Ngadi dan M. Noveria. 2017. Keberlanjutan perkebunan kelapa kelapa sawit di Indonesia dan prospek pengembangan di kawasan perbatasan. *masyarakat Indonesia*, 43(1): 95 – 111.
- Panjaitan, M., Syahrin, A., Suhaidi, dan M. Siregar. 2014. Analisis hukum terhadap kewajiban sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan investasi di Indonesia (studi pada PT. Rea Kaltim Plantation – Jakarta). *USU Law Journal*, 2(1): 43 – 61.
- Purba, J.H.V dan Sipayung, T. 2017. Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1): 81 – 94.
- Saragih, J.M. dan Hariyadi. 2016. Pengelolaan lahan gambut di perkebunan kelapa sawit di Riau. *Buletin Agrohorti*, 4(3): 312 – 320.
- Sinaga, D.M dan Hendarto, M. 2012. Analisis kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(2): 1 – 13.
- Sudiono, S.H. Sutjahjo, N. Wijayanto, P. Hidayat, P, dan P. Kurniawan. 2017. Analisis berkelanjutan usahatani tanaman sayuran berbasis pengendalian hama terpadu di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Hortikultura*, 27(2): 297 – 310.
- Sumartono, E., M. Suryanty, R. Badrudin, dan A. Rohman. 2018. Analisis pemasaran tandan buah segar kelapa sawit di Kecamatan

- Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Agraris*, 4(1): 28 – 35.
- Susilo, S.B., 2003. Keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil: studi kasus Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Disertasi Program Pasca Sarjana IPB.
- Suswati, D., B. Hendro, D. Shiddieq, dan D. Indradewa. 2011. Identifikasi sifat fisik lahan gambut Rasau Jaya III Kabupaten Kubu Raya untuk Pengembangan Jagung. *Jurnal Perkebunan & Lahan Tropika*, 1: 31 – 40.
- Suwanda, M.H. 2016. Analisis keberlanjutan usaha tani tanaman karet di lahan gambut terdegradasi: studi kasus di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 22(3): 115 – 124.
- Triyono, D., A. Muani, dan S. Sagiman. 2015. Strategi pengembangan kebun kelapa sawit lahan gambut Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4(2): 40 – 48.
- Utami, R., P.E.I. Kumala, dan M. Ekayani. 2017. Dampak ekonomi dan lingkungan ekspansi perkebunan kelapa sawit (studi kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 22(2): 115 – 126.
- Wetlands International. 2003. Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di Pulau Sumatera. Buku Edisi Pertama. Wetlands International–Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC). ISBN : 979-95899-3-2.
- Widayana, E. 2016. Pendekatan pengendalian fluktuasi harga tandan buah segar terhadap pendapatan petani kelapa sawit. *Jurnal Habitat*, 27(3): 103 – 108.
- Wigena, I.G.P, H. Siregar, nFN. Sudradjat, dan S.R.P Sitorus. 2009. Desain model pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan berbasis pendekatan sistem dinamis (studi kasus kebun kelapa sawit plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau). *Jurnal Agro Ekonomi*, 27(1): 81 – 108.
- Yunita.S. C. dan J. E. Wawa. 2018. Ironi sektor perkebunan. *Harian Kompas*, 14 Desember 2018. p. 16.